



Resistensi Masyarakat Pesisir Pantai Merpati atas Kebijakan Pembangunan Waterfront City Bulukumba

Bahrul Amsal^{1*}, Jusnawati Jusnawati²

^{1,2} Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Makassar 90221, Indonesia.

Email: bahrul.amsal@unm.ac.id

(Diterima : 04-Maret-2024; Disetujui: 20-Maret-2024; Online: 20-Maret-2024)



©2023 The Authors. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah license CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

ABSTRACT

This study aims to determine the pattern and stage of resistance of the Merpati Bulukumba coastal community after the enactment of Regional Regulation No. 21 of 2012 concerning the 2012-2032 Bulukumba Regency Spatial Planning regarding the development of coastal areas through the Waterfront City grand design. This study used a descriptive qualitative method in the form of written narratives from the research subjects and observed behavior. In this study, the researchers determined the research location to be the coastal area of Merpati Beach in the Terang-Terang sub-district, Bulukumba district, South Sulawesi. The results showed that first, there was resistance in the coastal communities of Merpati Beach, with open patterns and strategies of resistance through rejection, demonstrations, and campaigns. Second, the process of resistance from the Pesisir Pantai Merpati community went through three stages so that they were able to influence local government policies through relocation decisions in the form of making shelter for the eviction victims.

Keywords: Resistance; Coastal Communities

1. PENDAHULUAN

Aiman, Athaya, dan Banu berlarian di sepanjang Pantai Merpati Bulukumba. Mereka bermain pasir menemukan kesenangan khas anak-anak ketika air ombak menyapu kaki mereka. Sama seperti pengunjung lain, ketiga bocah ini datang menikmati keindahan Pantai Merpati yang belakangan menjadi ikon baru masyarakat Bulukumba. Pantai Merpati tidak seperti pasir di sepanjang semenanjung Bira, kawasan wisata Bulukumba yang terkenal karena pasir putihnya. Tapi untuk masyarakat Bulukumba, terutama masyarakat yang tinggal di ibu kota kabupaten, kawasan Pantai Merpati menjadi daya tarik tersendiri untuk memanfaatkan waktu senggang. Di pagi hari, di sekitar pantai merpati, banyak warga kota memanfaatkan keteduhan hutan kota yang bersisian langsung dengan pesisir Pantai Merpati. Di sore hari, tempat ini ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai kalangan.

Di masa lalu kawasan Pantai Merpati merupakan kawasan kumuh, tidak terurus, dan nyaris tidak mendapatkan perhatian serius pemerintah kota. Meski berada di kota kabupaten lokasi ini menjadi tempat pembuangan sampah. Baru di malam hari lah pantai ini menunjukkan geliat aktivitas. Banyak warung remang-remang buka di malam hari, penjaja kuliner, atau sesekali dimanfaatkan untuk kegiatan pagelaran musik. Selebihnya, di sekitar kawasan ini diisi oleh warga pinggiran yang mendirikan rumah-rumah gubuk semi permanen membentuk suatu lingkungan sendiri. Mereka dahulu datang dari Jeneponto atau Bantaeng yang memilih tinggal di sepanjang pantai Merpati

karena tidak ada pilihan lain. Diperkirakan mereka telah mendiami kawasan pantai Merpati selama dua puluh tahun lebih. Di tempat ini mereka bekerja sebagai nelayan kecil, pemulung rumput laut, atau menjadi *payabo-yabo*. Sebagai suatu komunitas, warga yang tinggal di sepanjang pesisir Pantai Merpati merupakan warga miskin kota yang terabaikan dan diabaikan.

Eksistensi warga Pantai Merpati terancam setelah tahun 2012 diputuskan akan dilakukan upaya penataan ruang di sepanjang pesisir pantai. Perencanaan program tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 yang lahir di era pemerintah Zainuddin Hasan, Bupati Bulukumba saat itu. Perda ini menetapkan kawasan pesisir Pantai Merpati akan dipersiapkan menjadi kawasan strategis kota. Ditilik dari sudut pandang ekonomi, kawasan strategis ini diproyeksikan menjadi salah satu daerah penyokong pendapatan pemerintah daerah (Muhammad, Imanullah, Jayakesuma Effendi, Maikhel, & Tosingke, 2023).

Di era pemerintahan Zainuddin Hasan, Perda ini direalisasikan ke dalam *grand design* bernama *Waterfront City*, gagasan tentang pembangunan kota untuk memanfaatkan pesisir pantai menjadi ruang publik terbuka bagi penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Seperti di kota-kota dunia lainnya, pantai memiliki keindahan panorama ketika dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk konteks Bulukumba, *waterfront city* diartikan sebagai ruang publik tempat berkumpulnya elemen masyarakat yang dipertemukan melalui aktivitas pendidikan, kesenian, perdagangan, dan olahraga.

Proyek pembangunan berskala besar ini merupakan kebijakan yang akan berdampak serius kepada masyarakat sekitar, terutama warga yang tinggal di sekitar pesisir pantai. Masyarakat pesisir pantai Merpati Bulukumba telah hidup bertahun-tahun secara tradisional dan terbatas. Kehidupan mereka berhubungan langsung dengan laut, terutama ketergantungan yang kuat dari kegiatan mencari sumber makanan dan tempat tinggal. Selama bertahun-tahun ikatan kepada laut melahirkan kehidupan tersendiri yang terikat secara budaya, sosial dan ekonomi. Meski disebutkan akan ikut membantu pengembangan ekonomi kerakyatan, dalam kenyataannya kebijakan ini akan membuat sejumlah warga yang sudah lama hidup dari kawasan pesisir menjadi tumbal pembangunan. Salah satu wujud dari ironi pembangunan adalah penggusuran.

Upaya penggusuran masyarakat pesisir Pantai Merpati pertama kali dilakukan pada tahun 2014 yang dihentikan karena penolakan massif masyarakat. Delapan tahun paska upaya penggusuran pertama itu Muchtar Ali Yusuf, Bupati Bulukumba periode 2021-2026 kembali merealisasikan program terkait. Akibat dari itu ratusan warga nelayan Pantai Merpati, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, menjadi korban penggusuran. Sebanyak 159 warga yang selama ini hidup dari kawasan pesisir kemudian menanggung ketidakpastian tempat tinggal pasca rumah mereka diratakan tanah. Melalui aparat gabungan unsur Pemerintah Kecamatan Ujung Bulu, Kepolisian dan TNI, Satuan Polisi Pamong Praja serta unsur dari PLN menjadi pihak yang memperjelas jurang masalah yang dihadapi masyarakat pesisir pantai Merpati Bulukumba.

Penggusuran merupakan masalah serius karena melibatkan interes kepentingan, masalah keadilan sosial, dan dampak atas kehidupan yang layak. Dalam arti ini, penggusuran sama artinya pencabutan sumber daya kehidupan yang membuat masyarakat pesisir berkubang lebih dalam dari masalah kemiskinan yang identik bagi masyarakat nelayan. Dengan kata lain pembangunan infrastruktur senantiasa melahirkan ketegangan antara pihak-pihak dominan dan subdominan, yang melahirkan

masalah baru karena melalui penggusuran kebijakan terkait akan memaksa masyarakat kehilangan tempat tinggal, mata pencarian, serta hilangnya ikatan sosial yang telah menjadi habitus selama bertahun-tahun di kawasan pesisir.

Kebijakan yang sedang direalisasikan ini mendapatkan pertentangan dari masyarakat pesisir Pantai Merpati Bulukumba. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal ditemukan telah ada proses perlawanan warga untuk menolak kebijakan yang berdampak kepada eksistensi masyarakat pesisir. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2023 proses perlawanan itu berfokus kepada kejelasan relokasi yang telah dijanjikan pemerintah bagi warga korban penggusuran. Meski secara hukum kawasan pesisir pantai Merpati merupakan tanah negara, yang berarti merupakan hak negara untuk memanfaatkannya, bukan berarti membuat masyarakat yang telah lama tinggal di sana diberlakukan semena-mena. Dalam arti ini merupakan tugas pemerintah daerah menyediakan ruang penghidupan layak bagi masyarakat yang telah lama hidup melalui pemanfaatan kawasan pesisir pantai.

(Naimu, 2017) memberikan kesimpulan bahwasannya terdapat pengaruh signifikan antara rencana pengembangan kawasan pesisir pantai Merpati Bulukumba dengan keadaan hidup masyarakat yang menjadi korban kebijakan terkait. Dampak atas kebijakan itu akan menimbulkan masalah baru berupa ketimpangan moral, berlakunya kesenjangan sosial, dan menjadi pemicu pembangunan kota yang tak terkendali sehingga tidak memberikan peluang bagi masyarakat pesisir dapat hidup layak di sekitarnya. (Handoyo, 2015) menjelaskan pola pembangunan kota mesti mempertimbangkan pertimbangan matang, terukur, dan strategis dalam merancang jenis kegiatan masyarakat macam apa yang dapat dimungkinkan jika kebijakan itu telah direalisasi. Dalam kesimpulannya Annisa menekankan perlunya pengendalian pemanfaatan ruang agar dalam realisasinya tidak berdampak buruk kepada keberadaan masyarakat pesisir.

Dalam perspektif sosiologi kajian tentang realitas sosial tersebut dapat dijelaskan melalui teori resistensi yang dipopulerkan James Scott (1993). Resistensi kemudian dipahami sebagai sebuah respon terhadap suatu inisiatif perubahan, suatu respon hasil rangsangan yang membentuk kenyataan di mana masyarakat hidup (Scott, 2000). Dalam menghadapi berbagai tekanan yang dilakukan pemerintah yang dirasa sangat membatasi ruang geraknya. Penelitian terdahulu dalam (Andri, 2011), (Lucky A. Attamimi, 2014), (Pramudita, Gunawan, & Riawanty, 2020) menunjukkan ancaman penggusuran yang melibatkan warga kota senantiasa melahirkan pola perlawanan berupa menggunakan strategi dan taktik termasuk protes, aksi kolektif, advokasi, dan upaya hukum untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah terkait. Dengan mendasarkan kepada fenomena ini maka penulis menganalisis pola resistensi yang dilakukan masyarakat pesisir pantai Merpati Bulukumba untuk merespon kebijakan pemerintah daerah Bulukumba.

2. METODE

Penelitian ini yang bersifat deskriptif-kualitatif mengenai sikap resistensi masyarakat yang berhadapan dengan kebijakan pemerintah mengenai rencana pengembangan kawasan pesisir pantai Merpati. Kesesuaian pemikiran James Scott dengan fenomena resistensi masyarakat pesisir Pantai Merpati adalah semakin kebijakan itu diupayakan justru akan menimbulkan sikap perlawanan dari masyarakat bersangkutan. Dengan pendekatan kualitatif penelitian ini dapat menangkap pemikiran, perasaan, atau keresahan masyarakat pesisir yang terdampak sebagai korban penggusuran. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam untuk menemukan data bermakna dari pihak terkait, yaitu organisasi serikat nelayan dan

terutama kelompok perlawanan itu sendiri yakni masyarakat pesisir Pantai Merpati.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menilik pendakuan James Scott mengenai tujuan resistensi adalah cara kelompok perlawanan meminimalisir atau mengingkari sama sekali argumen atau pengklaiman yang dilahirkan oleh kelas dominan. Tujuan dari penolakan ini adalah untuk menunjukkan eksistensi kelompok perlawanan melalui pengakuan tandingan dalam menyikapi wacana kelompok dominan. Upaya membangun klaim tandingan ini memerlukan kesadaran bersama yang secara dialektis akan menyanggupi lahirnya blok perlawanan berupa organisasi atau aliansi penolakan. Ditinjau dari perspektif gerakan sosial, kelahiran organisasi ini menjadi wadah pergerakan yang menampung keluh kesah, pemikiran, dan harapan masyarakat agar dapat terkonsolidasikan ke dalam gerakan yang sistematis dan bertahap dalam rangka mangajukan tuntutannya.

James Scott juga mengemukakan setiap gerakan perlawanan umumnya akan melalui fase-fase perlawanan dimulai dari: Pertama, fase pergerakan, kedua, fase membangun kesadaran yang dilanjutkan sampai fase ketiga yaitu membangun gerakan. Fase selanjutnya yaitu tahap mempengaruhi kelompok sasaran, kemudian dilanjutkan pada fase capaian atau keluaran. Setiap fase ini dilihat dari bentuknya dibedakan menjadi dua model resistensi, yaitu perlawanan terbuka atau terang-terangan, dan perlawanan tertutup atau diam-diam.

3.1 Faktor penyebab resistensi

3.1.1 Faktor budaya dan ekonomi

Masyarakat pesisir merupakan entitas historis yang terikat dengan laut sebagai bagian penting terhadap kehidupannya. Kebergantungan yang tinggi kepada laut menghubungkan mereka dengan sumber daya perikanan sebagai bahan makanan dan sumber pendapatan. Sebagai komunitas, masyarakat pesisir menekankan nilai kehidupan kolektif yang cukup kuat. Di pesisir pantai Merpati, masyarakat yang sebelumnya terancam penggusuran menyandarkan kehidupannya kepada pengelolaan air laut, terutama menjadi nelayan kecil dan pencari rumput laut.

Kehidupan yang demikian sulit tidak memberikan kepada mereka akses yang lebih besar kepada seperti misalnya menjadi petani rumput laut sepenuhnya, seperti ditemukan di beberapa tempat di sepanjang pantai antara Bulukumba sampai Kabupaten Bantaeng, yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. AA mendaku untuk menjadi petani rumput laut membutuhkan pengeluaran yang tidak sedikit. Ia mengatakan seperti misalnya hanya untuk membeli tali tempat diikatnya bibit rumput laut ia mesti mengumpulkan uang berminggu-minggu, sementara di waktu bersamaan ia juga membutuhkan pengeluaran lain seperti biaya makan, atau uang untuk sekolah anaknya. AA merupakan salah satu warga yang telah lama tinggal di pesisir pantai Merpati, bahkan ia menyebut lebih dahulu ada sebelum Perda menyangkut pembangunan *waterfront city* dicetuskan pemerintah Bulukumba.

S, ketua serikat nelayan yang menjadi koordinator dalam menggalakan aksi perlawanan mangatakan dalam kasus masyarakat Pantai Merpati telah membentuk pola kehidupan yang membudaya dengan lingkungan laut. S menyatakan mesti masyarakat pesisir di Pantai Merpati sebagaiannya bukan orang asli Bulukumba, tapi keberadaan mereka yang telah bermukim selama kurang lebih dua dekade, tidak bisa diabaikan begitu saja. Secara alas hak, tempat tinggal warga di Pantai Merpati diakui merupakan tanah negara yang dikelola oleh pemerintah daerah. Meski demikian, S mengatakan mereka juga punya hak ekonomi yang mesti diperhatikan oleh pemerintah, apalagi mereka telah lama ada hidup di lokasi penggusuran. Berdasarkan itulah,

dikarenakan ketika penggusuran dilakukan akan berdampak secara ekonomi bagi warga tergusur. BN mengatakan ia kesulitan jika mesti pindah dari sekitar Pantai Merpati, selain karena telah menganggap itu merupakan kampung halamannya, satu-satunya dasar ia dapat memenuhi kebutuhan ekonominya adalah dengan cara mengumpulkan rumput laut yang terbawa arus dimusim-musim tertentu.

Di sisi lain, galibnya masyarakat pesisir sering menghadapi kesulitan jika hidup menyatu dengan masyarakat yang telah mengembangkan gaya hidup urban. Perlu diketahui warga yang tinggal di Pantai Merpati masih kental hidup dengan kebiasaan tradisional sehingga kesulitan menerima perubahan-perubahan ketika dibandingkan dengan warga kota lainnya. Dengan kata lain, warga pesisir Merpati secara kebudayaan telah mengembangkan suatu cara hidup yang masih mempertahankan budaya masyarakat pesisir yang lebih tradisional dengan alam kehidupan modern seperti warga kota lainnya.

3.1.2 Faktor Struktur

Tipikal masyarakat pesisir yang mengembangkan pola hidup tradisional merupakan entitas masyarakat yang sulit menerima perubahan dikarenakan adanya faktor tradisi. Toh jika perubahan itu dapat diterima, masyarakat Pantai Merpati tidak dapat langsung beradaptasi sebelum melakukan proses seleksi yang disesuaikan dengan kebiasaan sebelumnya. Itulah sebabnya, perubahan struktur aturan berupa Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba mengakibatkan penolakan. Penolakan ini cukup beralasan karena adanya perubahan aturan akan mempengaruhi struktur ekonomi masyarakat itu sendiri.

Perubahan struktur ekonomi karena adanya peraturan daerah di atas bakal menyebabkan kesulitan yang dihadapi warga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Yang paling telak mengalami perubahan ini sudah tentu adalah warga pesisir pantai yang sehari-harinya melakukan kegiatan ekonomi melalui aktivitas pengumpul rumput laut. Rencana pemindahan tempat tinggal ini, dengan kata lain akan mengubah cara atau kegiatan ekonomi masyarakat pantai merpati yang terhubung langsung dengan laut sebagai basis mata pencariannya.

3.2 Fase perlawanan masyarakat Pantai Merpati

Berdasarkan tinjauan teoritik James Scott fase-fase perlawanan oleh masyarakat dimulai dari: Pertama, fase pergerakan; kedua, fase membangun kesadaran; ketiga, fase membangun gerakan; keempat dan kelima merupakan fase mempengaruhi kelompok sasaran, dan fase capaian atau keluaran. Setiap fase ini dilihat dari bentuknya dibedakan menjadi dua model resistensi, yaitu perlawanan terbuka atau terang-terangan, dan perlawanan tertutup atau diam-diam.

Masyarakat pantai Merpati, seperti diungkapkan S dalam melakukan perlawanan atas kebijakan pemerintah kota Bulukumba menunjukkan pola yang menyerupai apa yang dinyatakan Scott di melakukan diskusi-diskusi bersama beberapa organisasi masyarakat yang membangun simpul-simpul perlawanan berbasis masyarakat. Fase ini dinyatakan S merupakan proses penting untuk langkah selanjutnya, yakni ketika gerakan perlawanan sudah memasuki tahap pembangunan. Di fase ini perlawanan menggunakan teknik advokasi secara terbuka dengan menggalang dukungan luas dari berbagai pihak. Dalam proses ini kampanye dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang dampak yang akan dialami oleh masyarakat tergusur.

Sesuai dengan pendasaran atas Scott, fase membangun kesadaran akan berimplikasi kepada usia perlawanan yang memasuki tahap institusionalisasi. Tahap institusionalisasi merupakan suatu proses membentuk kelompok atau aliansi

perlawanan yang melibatkan organisasi LSM, komunitas, mahasiswa, dan pihak-pihak yang peduli masyarakat tergesur. Hal ini dimaksudkan merupakan upaya mempermanenkan perlawanan ke dalam struktur organisasi yang menjadi alat perlawanan.

Fase ketiga yaitu membangun gerakan berhubungan dengan fase lanjutan yaitu bagaimana struktur organisasi perlawanan diarahkan kepada kelompok sasaran yaitu pemerintah kota Bulukumba. M yang merupakan salah satu warga mengakui dalam proses di tahap ini terjadi pembagian peran di antara masyarakat pantai Merpati yang dilibatkan ke dalam struktur organisasi perlawanan. Menurut Scott, fase mempengaruhi kelompok sasaran dilahirkan ke dalam aksi nyata berupa perlawanan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Di lapangan, resistensi warga pantai Merpati dinyatakan melalui aksi demonstrasi yang dilakukan seperti di alun-alun kota yang berhadapan langsung dengan kantor pemerintahan. Melalui aliansi peduli korban penggusuran, aksi demonstrasi juga dilakukan di kantor pemerintahan kota Bulukumba menggunakan berbagai bentuk proses komunikasi dengan mengedarkan pamflet, pernyataan sikap, dan spanduk untuk menyatakan sikap dan aspirasi yang menjadi harapan masyarakat pantai Merpati. Fase terakhir dibilangkan Scott yaitu fase capaian atau keluaran merupakan upaya yang diharapkan mampu menyerap aspirasi dari masyarakat tergesur pantai Merpati, yaitu dapat memperhatikan tuntunan mereka untuk bertahan di lokasi tempat bermukim sekarang.

4. KESIMPULAN

Resistensi merupakan upaya masyarakat yang tinggal di titik-titik lokasi penggusuran agar dapat terus tinggal di sepanjang pantai Merpati Bulukumba. Resistensi yang dilakukan didorong karena adanya faktor budaya dan struktur yang menjadi sebab mengapa masyarakat pantai Merpati memilih bertahan di lokasi saat ini. Secara kebudayaan dan struktur ekonomi tidak memungkinkan bagi warga tergesur berpindah lokasi karena terikat secara kebudayaan atas laut sebagai basis kehidupannya. Secara ekonomi penggusuran akan mengubah mata pencarian sebagai pencari rumput laut yang telah dilakukan selama mereka hidup bersisian dengan pantai Merpati.

Proses resistensi dilakukan melalui berbagai proses atau fase-fase perlawanan berupa pertama, fase pergerakan. Kedua yaitu fase membangun kesadaran yang dilanjutkan ke fase ketiga berupa upaya membangun gerakan dengan membentuk aliansi masyarakat peduli penggusuran. Fase keempat dan kelima yaitu fase mempengaruhi kelompok sasaran dan fase capaian atau keluaran, yang ditujuka kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kebijakan dan nasib masyarakat tergesur, yang menghendaki agar peraturan yang dikeluarkan tidak memakan korban.

DAFTAR RUJUKAN

- Andri, A. (2011). Festival Jogokali: Resistensi Terhadap Penggusuran dan Gerakan Sosial-Kebudayaan Masyarakat Urban. *Jurnal Sosiologi Islam*, 1(2), 49-70. Retrieved from <http://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/JSI/article/view/16>
- Handoyo, E. (2015). Makna Ruang Publik Bagi Pedagang Kaki Lima: Studi tentang Resistensi terhadap Penggusuran. *Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat*, (1), 978-979.
- Lucky A. Attamimi. (2014). Resistensi Warga Pinggir Rel Surabaya (Studi Deskriptif Resistensi Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya Terhadap Pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya). UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Muhammad, A., Imanullah, A., Jayakesuma Effendi, S., Maikhel, S., & Tosingke, P. (2023). Perda Bulukumba No. 21 Tahun 2012: Pertentangan Peningkatan Ekonomi

- Vs Hak Bertempat Tinggal Masyarakat. *Jurnal Nomokrasi*, 1(1), 11-21. Retrieved from <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/17/tempat-tinggalnya->
- Naimu, M. A. M. (2017). Pengaruh Pengembangan Kawasan Pesisir Pantai Merpati terhadap Kondisi Sosial Budaya Masyarakat di Kelurahan Terang - terang Kabupaten Bulukumba. *Makassar: UIN Alauddin Makassar*, 1-141. Retrieved from <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/5880>
- Pramudita, P., Gunawan, B., & Riawanty, S. (2020). Resistensi Warga di Bantaran Ciliwung terhadap Rencana Penggusuran oleh Pemerintah. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Scott, J. C. (2000). Senjatanya Orang-orang yang Kalah: Bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari kaum tani. (*No Title*).